

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH



INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)

Jln. Sutan Syahrir No. 41 Pangkalan Bun 74112 Telp. (0532) 21412, 25137

Fax. (0532) 25233 E-mail : bpkad.kotawaringinbarat@gmail.com

Website : www.bpkad.kotawaringinbaratkab.go.id

2018 – 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jln. Sutan Syahrir No. 41 Pangkalan Bun 74112

Telp. (0532) 21412, 25317 Fax. (0532) 25233 E-mail : bpkad.kotawaringinbarat@gmail.com
Website : www.bpkad.kotawaringinbaratkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 050/01-A/I/BPKAD/2018**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018 – 2022**

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 – 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis;
- KEDUA** : Penyusunan Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Kotawaringin Barat cq. Bagian Organisasi dan tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada Tanggal : 15 Januari 2018

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT


Drs. M. FAUZI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600103 199003 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor : 050/01-a/I/BPKAD/2018
Tanggal : 15 Januari 2018
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2018 – 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Setiap Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Pertanggungjawaban yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Opini atas Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Daerah	Persentase Sertifikasi dan Inventarisasi Aset / Barang Milik Daerah	100	100	100	100	100
3	Pelaksanaan Belanja Daerah yang Optimal	Persentase Penyerapan Belanja langsung dan Tidak Langsung	100	100	100	100	100
4	Pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Efesien	Persentase Realisasi Kinerja dan Keuangan yang Seimbang	100	100	100	100	100
5	Pengembangan Organisasi yang Handal	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran berupa Penyediaan Aneka jasa	100	100	100	100	100

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Visi	:	Menjadi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel dan Amanah untuk mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Barat yang Sejahtera, Berkeadilan dan Jaya
Misi 1	:	Mengembangkan, Membangun, dan Melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Manajemen Aset Daerah yang Sehat, Hati-hati, dan Akuntabel
Tujuan 1	:	Meningkatkan Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Pertanggungjawaban yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Opini atas Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

Misi 1	:	Mengembangkan, Membangun, dan Melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Manajemen Aset Daerah yang Sehat, Hati-hati, dan Akuntabel
Tujuan 2	:	Meningkatkan Kualitas Manajemen Aset Daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Daerah	Persentase Sertifikasi dan Inventarisasi Aset / Barang Milik Daerah	Jumlah Aset yang Bersertifikat dibagi jumlah Aset yang belum Bersertifikat dikali 100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Aset / Jumlah Sertifikat

Misi 2	:	Membangun dan Mengembangkan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Modern dan Terintegrasi
Tujuan 3	:	Mengelola Penatausahaan Keuangan Daerah yang Profesional, Akuntabel, dengan Mengedepankan Kepuasan Stakeholders atas Kinerja Perbendaharaan Daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Pelaksanaan Belanja Daerah yang optimal	Persentase Penyerapan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung	Jumlah Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung dibagi Jumlah Pagu Belanja Langsung dan Tidak Langsung dikali 100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan

Misi 2	: Membangun dan Mengembangkan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Modern dan Terintegrasi
Tujuan 4	: Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Belanja Daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Pengelolaan Keuangan yang Efekif dan Efisien	Persentase Realisasi Kinerja dan Keuangan yang Seimbang	Jumlah Realisasi Kinerja dibagi Jumlah Pagu Belanja Langsung dan Tidak Langsung dikali 100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan

Misi 3	: Membangun dan Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Akuntabel, Responsibel, dan Amanah
Tujuan 5	: Mengembangkan Organisasi yang Handal

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Pengembangan Organisasi yang Handal	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran berupa penyediaan Aneka Jasa	Jumlah Realisasi Belanja Langsung dibagi Jumlah Pagu Belanja Langsung dikali 100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan

**KEPALA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Drs. M. FAUZI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600103 199003 1 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia – Nya, Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 – 2022 telah dapat diselesaikan.

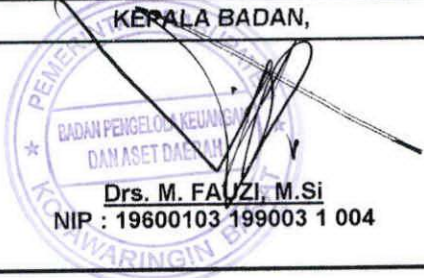
Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun untuk mengukur ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun IKU secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing – masing tingkatan (level) secara berjenjang.

Akhirnya dengan menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dan kami berharap melalui dokumen ini dapat digunakan sebagai upaya peningkatan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada masa yang akan datang.

**KEPALA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



**Drs. M. FAUZI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600103 199003 1 004**

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
<i>Jln. Sutan Syahrir No. 41 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah 74112 Telp. (0532) 21412 Fax. (0532) 25233</i>
Bidang Kewenangan
Keuangan dan Aset Daerah
Visi
Menjadi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel dan Amanah untuk mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Barat yang Sejahtera, Berkeadilan dan Jaya
Misi
<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan, Membangun, dan Melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Manajemen Aset Daerah yang Sehat, Hati-hati dan Akuntabel - Membangun dan Mengembangkan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Modern dan Terintegrasi - Membangun dan Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Akuntabel, Responsibel, dan Amanah
Tujuan
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Kualitas Manajemen Aset Daerah - Mengelola Penatausahaan Keuangan Daerah yang Profesional, Akuntabel, dengan mengedepankan Kepuasan Stakeholders atas Kinerja Perbendaharaan Daerah - Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Belanja Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan Organisasi yang Handal
Sasaran
<ul style="list-style-type: none"> - Pertanggungjawaban yang Transparan dan Akuntabel - Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Daerah - Pelaksanaan Belanja Daerah yang Optimal - Pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Efisien - Pengembangan Organisasi yang Handal
Tugas Pokok
Membantu Bupati dalam Memimpin, Mengendalikan, dan Mengkoordinasikan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Lingkup Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi Bidang Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi dan Aset
Fungsi
<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan dan melaksanakan Kebijakan Teknis di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - Penyusunan, Perencanaan, dan Pelaksanaan Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD - Pelaksanaan Fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Dana Transfer - Penyusunan laporan Keuangan Daerah dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan barang Milik Daerah yang berada dalam Penguasaannya <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Fungsi Pengelolaan Barang Daerah - Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas Fungsinya
KERALA BADAN,
 <p>Drs. M. FAUZI, M.Si NIP : 19600103 199003 1 004</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam kerangka pembangunan *Good Governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Sehubungan dengan hal tersebut maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *Good Governance* dan sekaligus *Result Oriented*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkannya PERMENPAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007, Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Dengan ditetapkannya IKU secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk memperbaiki kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tujuan dari ditetapkananya Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi setiap instansi pemerintah adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Dengan ditetapkananya IKU instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen antara lain :

- Perencanaan Jangka Menengah
- Perencanaan Tahunan
- Perencanaan Anggaran
- Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja
- Pengukuran Kinerja
- Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Pemantauan Dan Pengendalian Kinerja, Pelaksanaan Program-Program Dan Kegiatan-Kegiatan

Melihat begitu pentingnya keberadaan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam suatu instansi pemerintah, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tahun 2018 – 2022 (terlampir).

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat

Tahun 2018 - 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Capaian Setiap Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pertanggungjawaban yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Opini atas Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Daerah	Persentase Sertifikasi dan Inventarisasi Aset / Barang Milik Daerah	100	100	100	100	100	100
3	Pelaksanaan Belanja Daerah yang Optimal	Persentase Penyerapan Belanja langsung dan Tidak Langsung	100	100	100	100	100	100
4	Pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Efisien	Persentase Realisasi Kinerja dan Keuangan yang Selimbang	100	100	100	100	100	100
5	Pengembangan Organisasi yang Handal	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran berupa Penyediaan Aneka jasa	100	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat

Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Capaian Setiap Tahun	SUMBER DATA
			2018	
1	2	3	4	5
1	Pertanggungjawaban yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Opini atas Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	BPKAD Kab. Ktw. Barat
2	Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Daerah	Persentase Sertifikasi dan Inventarisasi Aset / Barang Milik Daerah	100	BPKAD Kab. Ktw. Barat
3	Pelaksanaan Belanja Daerah yang Optimal	Persentase Penyerapan Belanja langsung dan Tidak Langsung	100	BPKAD Kab. Ktw. Barat
4	Pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Efesien	Persentase Realisasi Kinerja dan Keuangan yang Seimbang	100	BPKAD Kab. Ktw. Barat
5	Pengembangan Organisasi yang Handal	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran berupa Penyediaan Aneka jasa	100	BPKAD Kab. Ktw. Barat

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Capaian Setiap Tahun	SUMBER DATA
			2019	
1	2	3	4	5
1	Pertanggungjawaban yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Opini atas Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	BPKAD Kab. Ktw. Barat
2	Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Daerah	Persentase Sertifikasi dan Inventarisasi Aset / Barang Milik Daerah	100	BPKAD Kab. Ktw. Barat
3	Pelaksanaan Belanja Daerah yang Optimal	Persentase Penyerapan Belanja langsung dan Tidak Langsung	100	BPKAD Kab. Ktw. Barat
4	Pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Efesien	Persentase Realisasi Kinerja dan Keuangan yang Seimbang	100	BPKAD Kab. Ktw. Barat
5	Pengembangan Organisasi yang Handal	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran berupa Penyediaan Aneka jasa	100	BPKAD Kab. Ktw. Barat

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat

Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Capaian Setiap Tahun	SUMBER DATA
			2020	
1	2	3	4	5
1	Pertanggungjawaban yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Opini atas Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	BPKAD Kab. Ktw. Barat
2	Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Daerah	Persentase Sertifikasi dan Inventarisasi Aset / Barang Milik Daerah	100	BPKAD Kab. Ktw. Barat
3	Pelaksanaan Belanja Daerah yang Optimal	Persentase Penyerapan Belanja langsung dan Tidak Langsung	100	BPKAD Kab. Ktw. Barat
4	Pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Efisien	Persentase Realisasi Kinerja dan Keuangan yang Seimbang	100	BPKAD Kab. Ktw. Barat
5	Pengembangan Organisasi yang Handal	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran berupa Penyediaan Aneka jasa	100	BPKAD Kab. Ktw. Barat

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat

Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Capaian Setiap Tahun	SUMBER DATA
			2021	
1	2	3	4	5
1	Pertanggungjawaban yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Opini atas Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	BPKAD Kab. Ktw. Barat
2	Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Daerah	Persentase Sertifikasi dan Inventarisasi Aset / Barang Milik Daerah	100	BPKAD Kab. Ktw. Barat
3	Pelaksanaan Belanja Daerah yang Optimal	Persentase Penyerapan Belanja langsung dan Tidak Langsung	100	BPKAD Kab. Ktw. Barat
4	Pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Efisien	Persentase Realisasi Kinerja dan Keuangan yang Seimbang	100	BPKAD Kab. Ktw. Barat
5	Pengembangan Organisasi yang Handal	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran berupa Penyediaan Aneka jasa	100	BPKAD Kab. Ktw. Barat

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Capaian Setiap Tahun	SUMBER DATA
			2022	
1	2	3	4	5
1	Pertanggungjawaban yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Opini atas Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	BPKAD Kab. Ktw. Barat
2	Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Daerah	Persentase Sertifikasi dan Inventarisasi Aset / Barang Milik Daerah	100	BPKAD Kab. Ktw. Barat
3	Pelaksanaan Belanja Daerah yang Optimal	Persentase Penyerapan Belanja langsung dan Tidak Langsung	100	BPKAD Kab. Ktw. Barat
4	Pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Efisien	Persentase Realisasi Kinerja dan Keuangan yang Seimbang	100	BPKAD Kab. Ktw. Barat
5	Pengembangan Organisasi yang Handal	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran berupa Penyediaan Aneka jasa	100	BPKAD Kab. Ktw. Barat

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Visi	:	Menjadi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel dan Amanah untuk mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Barat yang Sejahtera, Berkeadilan dan Jaya
Misi 1	:	Mengembangkan, Membangun, dan Melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Manajemen Aset Daerah yang Sehat, Hati-hati, dan Akuntabel
Tujuan 1	:	Meningkatkan Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Pertanggungjawaban yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Opini atas Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

Misi 1	:	Mengembangkan, Membangun, dan Melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Manajemen Aset Daerah yang Sehat, Hati-hati, dan Akuntabel
Tujuan 2	:	Meningkatkan Kualitas Manajemen Aset Daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Daerah	Persentase Sertifikasi dan Inventarisasi Aset / Barang Milik Daerah	Jumlah Aset yang Bersertifikat dibagi jumlah Aset yang belum Bersertifikat dikali 100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Aset / Jumlah Sertifikat

Misi 2	:	Membangun dan Mengembangkan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Modern dan Terintegrasi
Tujuan 3	:	Mengelola Penatausahaan Keuangan Daerah yang Profesional, Akuntabel, dengan Mengedepankan Kepuasan Stakeholders atas Kinerja Perbendaharaan Daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Pelaksanaan Belanja Daerah yang optimal	Persentase Penyerapan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung	Jumlah Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung dibagi Jumlah Pagu Belanja Langsung dan Tidak Langsung dikali 100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan

Misi 2	:	Membangun dan Mengembangkan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Modern dan Terintegrasi
Tujuan 4	:	Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Belanja Daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Pengelolaan Keuangan yang Efekif dan Efesien	Persentase Realisasi Kinerja dan Keuangan yang Seimbang	Jumlah Realisasi Kinerja dibagi Jumlah Pagu Belanja Langsung dan Tidak Langsung dikali 100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan

Misi 3	:	Membangun dan Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Akuntabel, Responsibel, dan Amanah
Tujuan 5	:	Mengembangkan Organisasi yang Handal

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Pengembangan Organisasi yang Handal	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran berupa penyediaan Aneka Jasa	Jumlah Realisasi Belanja Langsung dibagi Jumlah Pagu Belanja Langsung dikali 100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan

**KEPALA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

